

Rekomendasi Model *Co-Management* Perikanan Kerapu (Serranidae) Skala Kecil yang Efektif di Provinsi Sulawesi Selatan

Recommendations for Effective Co-Management Model of Small-Scale Grouper (Serranidae) Fishery in South Sulawesi Province

Alief Fachrul Raazy^{1✉}, Rijal Idrus¹, Eymal B. Demmalino¹

¹Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia

✉Correspondent author : alief.afr@gmail.com

Abstrak

Tata kelola (kebijakan) yang mengatur sumber daya perikanan perlu melibatkan industri dalam rantai pasok (pasar) dan nelayan kerapu skala kecil (komunitas) dalam kerangka *co-management* agar pengelolaan lebih efektif sekaligus mendukung upaya perbaikan perikanan – *Fisheries Improvement Project* (FIP) yang didorong berbagai pihak secara global (Conservation Alliance, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan model *co-management* perikanan kerapu skala kecil untuk dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mendiagnosa kesiapan (*enabling condition*) dan kemauan (*motivation*) semua pihak agar bisa diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten (*implementation*). Hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan dan strategi utama model *co-management* perikanan kerapu skala kecil di antaranya adalah (a) Optimalisasi peran pasar yang mengedepankan keterlacakan dan perbaikan tata kelola melalui pendekatan rantai pasok, (b) Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level melalui pendekatan teknokratik, (c) Penguatan nelayan dan kelembagaan lokal melalui pendekatan partisipatif, (d) Mengumpulkan dukungan dan kolaborasi multipihak melalui pendekatan kolaboratif. Rekomendasi peta jalan *co-management* kerapu skala kecil di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 3 tahapan pokok, yaitu: (a) Tahap Inisiasi: Komitmen, Dukungan dan Pengorganisasian, (b) Tahap Akselerasi: Komite Bersama dan Prototipe *co-management*, dan (c) Tahap Institusionalisasi: *Scaling up* dan Pengorganisasian Forum Nelayan.

Key words: *co-management*; perikanan skala kecil; *fisheries improvement project*; kerapu; sulawesi selatan

Abstract

Governance (policy) that regulates fisheries resources needs to involve industry in the supply chain (market) and small-scale grouper fishermen (community) within a co-management framework so that management is more effective while simultaneously supporting the Fisheries Improvement Project (FIP) which is driven by various parties globally (Conservation Alliance, 2021). This study aims to recommend a small-scale grouper fishery co-management model to be carried out in South Sulawesi Province. This study diagnoses the readiness (*enabling condition*) and willingness (*motivation*) of stakeholders so that they can be applied and implemented consistently (*implementation*). The results of this study indicate that the main approaches and strategies for the co-management model of small-scale grouper fisheries include (a) Optimizing the role of the market that promotes traceability and improving governance through a supply chain approach, (b) Synergy and synchronization of the role of government at all levels through an approach technocratic, (c) Strengthening fishermen and local institutions through a participatory approach, (d) Gathering multi-stakeholder support and collaboration through a collaborative approach. The recommended roadmap for small-scale grouper co-management in South Sulawesi Province includes three main stages, namely: (a) Initiation Stage: Commitment, Support, and Organizing, (b) Acceleration Stage: Joint Committee and Co-management Prototype, and (c) Stage Institutionalization: *Scaling up* and Organizing Fishermen's Forums.

Keywords: *co-management*; *small-scale fisheries*; *fisheries improvement project*; grouper; south sulawesi

Pendahuluan

Perikanan skala kecil menyediakan mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi jutaan nelayan skala kecil dan masyarakat lokal di berbagai penjuru dunia (Bene, et al., 2016). Komunitas dalam hal ini nelayan menggantungkan penghidupannya pada aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan dokumen Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Kerapu (*Grouper*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 tahun 2020, permintaan pasar ekspor cukup tinggi dan mendorong eksploitasi semakin meningkat, diikuti oleh maraknya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan atau *destructive fishing*.

Dorongan perilaku tersebut di atas tidak lepas dari dinamika perkembangan usaha pasar pada komoditi tertentu yang tinggi dari pasar luar negeri maupun domestik, termasuk ikan kerapu. Tata kelola yang digerakkan oleh pemerintah, cenderung masih sentralistik dan bertumpu pada sisi kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan masih sangat lemah dan tidak berjalan sepenuhnya. Dorongan *community-based management* juga mengalami kendala antara lain adanya konflik antar nelayan yang mendukung upaya perikanan berkelanjutan dan yang masih bertahan pada aktivitas *destructive fishing*. Padahal, pengelolaan sumber daya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pihak lainnya (Jentoft, 1989). Pendekatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama adalah melalui *co-management*.

Pendekatan *co-management* ini sekaligus mendukung upaya perbaikan perikanan – *Fisheries Improvement Project (FIP)* yang didorong berbagai pihak secara global untuk mengoordinasikan seluruh konsep dan pedoman melalui badan yang disebut *Conservation Alliance for Seafood Solutions (CASS)*. FIP merupakan upaya *multi-stakeholder* dalam menanggulangi tantangan lingkungan pada sektor perikanan. Proyek ini menggunakan kekuatan sektor swasta untuk mendorong perubahan positif menuju perikanan yang berkelanjutan dan berupaya membuat perubahan-perubahan ini bertahan melalui kebijakan (Conservation Alliance, Revisi Januari 2021).

Keterlibatan nelayan skala kecil akan memberi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan, termasuk data dan informasi akan terkonfirmasi langsung. Selain itu, pihak inilah yang paling berdampak pada keberhasilan maupun kegagalan dari suatu konsep pengelolaan. Partisipasi penting lainnya meliputi pemerintah, para manajer sektor perikanan, akademisi, *non-government organization (NGO)*, dan lain-lain. Partisipasi berarti berkontribusi secara finansial atau

dalam bentuk barang/jasa (*in-kind*) kepada pelaksanaan *co-management* yang didorong dan/atau mengerjakan suatu tindakan sesuai rencana kerja. Kesepakatan untuk pengelolaan bersama tidak lahir begitu saja. Butuh diskusi yang panjang, menimbang segala potensi dan risikonya, termasuk mencari solusi atas kemungkinan masalah yang akan muncul (Raazy, Moetasim, Dessibali, Zulkarnaen, & Rafiq, 2022)

Dalam mendorong *co-management*, membutuhkan kesiapan (*enabling*) dan kemauan (*motivation*) semua pihak agar bisa diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten (*implementation*). Penekanan utama diletakkan pada kesiapan dan motivasi stakeholder tingkat lokal terutama nelayan skala kecil untuk bisa bergerak bersama dan setara dalam kerangka *co-management* perikanan kerapu skala kecil dengan pihak lainnya. Penelitian ini kemudian “memetakan” kondisi eksisting pengelolaan perikanan kerapu skala kecil dan mendiagnosa kemungkinan penerapan *co-management* perikanan kerapu skala kecil untuk dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober 2022 dengan lokasi penelitian di Pesisir Barat Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari tiga kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian, yakni Kabupaten Takalar meliputi Desa Galesong Kota dan Pulau Satangnga, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pulau Sarappo Lompo, dan Kota Makassar di Pulau Langkai dan Pulau Barrang Caddi.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan wawancara langsung menggunakan instrumen kuesioner. Wawancara di tingkat pulau/desa dilakukan kepada nelayan/keompok nelayan, pemerintah tingkat pulau/desa, tokoh masyarakat, dan pengepul. Pengambilan data pada tingkat institusi pemerintah seperti Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM Makassar), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan Kota/Kabupaten, Unit Pengolahan Ikan (UPI), penyuluh perikanan, akademisi, pengepul tingkat kota/kabupaten, dan NGO.

Pengumpulan data dilakukan untuk menentukan karakteristik perikanan kerapu di lokasi penelitian dengan mendeskripsikan sejarah, musim, dan lokasi penangkapan ikan, upaya penangkapan ikan, jenis hasil tangkapan, rantai pasok, dan struktur pengelolaan perikanan kerapu. Selain itu, untuk menerapkan *co-management* perikanan kerapu,

penelitian ini melakukan identifikasi dan analisis stakeholder kunci, analisis pendekatan utama dan strategi utama, serta penyusunan peta jalan model *co-management* perikanan kerapu skala kecil.

Analisis Data

Karakteristik Perikanan Kerapu

Karakteristik perikanan dianalisis dengan mendeskripsikan kondisi perikanan dan tata kelolanya pada tingkat nelayan. Deskripsi akan berdasarkan pada jawaban responden mengenai sejarah, musim, dan lokasi penangkapan ikan, upaya penangkapan ikan, jenis hasil tangkapan, rantai pasok (*supply chain*), dan struktur pengelolaan perikanan.

Stakeholder Kunci

Analisis stakeholders dilakukan dengan menganalisa *Influence* (pengaruh) dan *Importance* (kepentingan) para pihak dalam pengelolaan perikanan kerapu skala kecil. Pihak kunci terlebih dahulu diidentifikasi terutama bagi kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kekuatan/kekuasaan untuk memengaruhi pelaksanaan dan/atau memiliki kepentingan signifikan dalam strategi pengelolaan (Ackermann & Eden, 2011). Dimensi kekuasaan dan kepentingan menjadi sesuatu yang signifikan dalam menentukan pihak kunci prioritas dan alat analisis yang digunakan adalah '*Power-Interest Grid*' untuk membantu menyeimbangkan kebutuhan penelitian terutama dalam mendefinisikan pemangku kepentingan yang luas sambil tetap menghasilkan angka yang dapat dikelola (Freeman & Reed, 1983).

Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuti, 1997). Analisis ini melahirkan pendekatan utama dan digunakan untuk memformulasikan secara detail strategi utama untuk *co-management* yang tepat.

Faktor Kunci Keberhasilan

Metodologi analisa faktor kunci keberhasilan ini merupakan hasil adaptasi dari Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi (MEKAR) yang dikembangkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) bersama *World Resources Institute* (WRI) sejak tahun 2014 (IUCN & WRI, 2014). Faktor kunci dikategorikan dalam 3 tema utama yang menjadi penentu keberhasilan yaitu: *motivation*, *enabling condition*, dan *implementation*.

Faktor-faktor kunci untuk setiap kategori di atas akan diformulasikan melalui indikator-indikator berdasarkan kebutuhan untuk memberikan strategi utama dalam *co-management*. Status dari indikator faktor kunci akan diberi warna sesuai dengan kondisi eksisting saat dilakukan penelitian. Warna merah jika tersedia; kuning belum sepenuhnya tersedia atau terpenuhi; dan/atau hijau belum tersedia atau terpenuhi.

Model Co-Management Kerapu Skala Kecil

Menentukan model *co-management* kerapu skala kecil yang tepat dengan memprioritaskan pemenuhan indikator-indikator atau faktor kunci keberhasilan pengelolaan perikanan kerapu skala kecil. Secara sistematis memilih cakupan yang menjadi kandidat pengelolaan perikanan kerapu, kemudian mengevaluasi apakah faktor kunci keberhasilan untuk pengelolaan tersebut sudah tersedia atau belum. Selanjutnya, pemenuhan indikator dengan mengidentifikasi strategi untuk menutup kesenjangan di antara faktor keberhasilan kunci yang saat ini belum tersedia dalam kandidat pengelolaan perikanan kerapu skala kecil. Secara sederhana, memprioritaskan status indikator dari warna merah dan kuning menjadi warna hijau.

Hasil dan Pembahasan

Perikanan Kerapu di Provinsi Sulawesi Selatan

Kondisi sosial ekonomi nelayan di tahun 1900-1980, sebelum masuknya modernisasi di sektor perikanan, cenderung pada pemenuhan kebutuhan primer dan belum terdorong untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Memasuki tahun 1980, nelayan mulai mengenal adanya modernisasi di bidang pelayaran dan penangkapan ikan. Ini membuat daya jelajah hingga metode penangkapan ikan, ditambah pilihan permintaan pasar terhadap komoditi yang semakin banyak. Bersamaan dengan permintaan ekspor ikan demersal/karang dari hongkong yang sangat tinggi pada tahun 1990-an, memberikan pilihan metode penangkapan termasuk aktivitas *destructive fishing* yang menggunakan bom dan bius. Wilayah penangkapan ikan kerapu oleh nelayan umumnya berjarak dari pulau atau pesisir antara 1-200 mil. Masyarakat mengkategorikan musim ada 2 yaitu musim barat dan musim timur; di antara kedua musim ini dimaknai sebagai peralihan. Musim mempengaruhi pergeseran lokasi penangkapan untuk mengadaptasi kondisi cuaca. Sebagai contoh, nelayan Pulau Barrang Caddi menangkap di sisi barat dan utara pulau ketika musim barat untuk berlindung dari ombak. Sementara beberapa nelayan Pulau Sarappo, melakukan penangkapan hingga 200 mil di perairan Teluk Bone, pada musim barat. Selain kerapu, nelayan pada musim-musim tertentu mencari hasil tangkapan dari komoditas lain. Tipe

nelayan rata-rata *multiple-target*, karakter individualis, namun beberapa lainnya berkelompok.

Beberapa wilayah memiliki penamaan armada penangkapan yang berbeda namun secara fungsi kurang lebih sama. Terdiri dari *jolloro* besar (umumnya >5 GT) digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan, dan *jolloro* kecil, *lepa-lepa* atau katinting dan *bala-balapan* atau *jalepara* (umumnya <5 GT) digunakan sebagai armada penangkapan ikan. Mayoritas, armada nelayan tidak memiliki surat-surat resmi. Biaya operasional dan pengadaan armada penangkapan ikan umumnya ditanggung sendiri oleh nelayan, namun ada juga yang ditanggung oleh punggawa darat (*papalele*). Nelayan di Galesong dan Satangnga juga telah mengakses bantuan modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembagian hasil tangkapan ditentukan dari besaran pinjaman dari punggawa darat. Nelayan berkelompok yang secara penuh mendapatkan modal (kapal, mesin dan alat tangkap) dari punggawa, pembagiannya adalah 20-40% untuk punggawa dengan rincian 10-20% menjadi milik punggawa dan 10-20% menjadi simpanan pemilik kapal (pemilik kapal biasanya adalah punggawa darat juga). Selanjutnya, dari 60-80% kemudian dipotong untuk biaya operasional dan sisanya dibagi rata dengan kru penangkapan (umumnya 2 orang). Sementara untuk nelayan mandiri yang memiliki pinjaman kepada punggawa, ada yang diberi 100% namun pinjaman dibayar tergantung kesediaan nelayan dan ada yang menyisihkan 5-10% untuk punggawa (*papalele*) sebagai simpanan.

Ada 5 jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kerapu skala kecil di lokasi penelitian antara lain, *speargun* atau tembak, pancing dasar, kedo-kedo, rawai, dan rawai dasar. Tangkapan nelayan kerapu tergantung ketersediaan di perairan. Meskipun demikian, beberapa nelayan memiliki target jenis prioritas, seperti kwaci merah/kerapu merah yang memiliki nilai jual tinggi. Ikan kerapu yang teridentifikasi berdasarkan wawancara dan survei di nelayan, pengepul pulau/darat, TPI/PPI, dan data dari para pihak kemudian dielaborasi dengan panduan identifikasi ikan yang menghasilkan beberapa penamaan (White, et al., 2013). Umumnya ada tiga macam sistem penamaan yang sering digunakan, yaitu: nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal (Omar, 2016). Berikut beberapa jenis ikan kerapu hasil survei dan studi literatur untuk di Sulawesi Selatan :

Tabel 1. Daftar jenis ikan kerapu di Sulawesi Selatan/WPPNRI 713

No	Nama lokal	Nama Umum	Nama Ilmiah	Sumber Data/ Informasi
1	Kwaci merah	Kerapu merah	<i>Cephalopholis sonnerati</i>	Nelayan; UPI
2	Kwaci hitam	Kerapu lumpur hitam	<i>Aethaloperca roga</i>	Nelayan
3	Kwaci putih	Kerapu minyak	<i>Epinephelus undulosus</i>	Nelayan

4	Kerapu tikus	Kerapu tikus/ bebek	<i>Chromileptes altivelis</i>	Nelayan; UPI; DKP Sulse
5	Kerapu bencong/geang	Kerapu lumpur	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	Nelayan
6	Tiger	Kerapu macan	<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>	Nelayan
7	Sunu eja	Kerapu sunu	<i>Plectropomus leopardus</i>	Nelayan; UPI; KKP, DKP Sulse
8	Sunu cambang	Kerapu lodi/ sunu	<i>Plectropomus maculatus</i>	Nelayan; UPI
9	Sunu raja	Kerapu sunu	<i>Plectropomus laevis</i>	Nelayan
10	Sunu gunting merah	Kerapu gunting/ ekor bulan	<i>Variola albimarginata</i>	Nelayan; KKP
11	Kerapu	Kerapu barong putih	<i>Epinephelus sexfasciatus</i>	Nelayan
12	Kerapu	Kerapu	<i>Epinephelus coioides</i>	UPI; KKP
13	Kerapu	Kerapu tutul/ lumpur	<i>Epinephelus malabaricus</i>	UPI
14	Kerapu	Kerapu babunjai	<i>Epinephelus bleekeri</i>	UPI
15	Kerapu	Kerapu macan/ belosoh	<i>Epinephelus corallicola</i>	UPI
16	Kerapu	Kerapu lumpur	<i>Epinephelus tauvina</i>	UPI; DKP Sulse
17	Kerapu	Kerapu karet	<i>Epinephelus coeruleopunctatus</i>	UPI;
18	Kerapu macan	Kerapu macan/ bandi	<i>Epinephelus areolatus</i>	KKP
19	Kerapu	Kerapu karet/ musang/ balong	<i>Epinephelus merra</i>	DKP Sulse
20	Kerapu	Kerapu bandih/ karang	<i>Cephalopholis boenack</i>	DKP Sulse

Data yang bersumber dari Nelayan berarti jenis kerapu yang pernah ditangkap oleh nelayan di lokasi penelitian dan status perdagangannya domestik atau dalam negeri. Sumber data dari UPI (Unit Pengolahan Ikan) berarti jenis kerapu yang perdagangannya luar negeri oleh industri skala besar yang bergabung dengan FIP *member*, namun tidak semua jenis kerapu yang diekspor tersedia di lokasi penelitian. Data yang bersumber dari KKP berarti jenis kerapu yang diatur stok dan status pemanfaatannya dalam RPP dan *harvest strategy*. Data yang bersumber dari DKP Sulse berarti jenis kerapu yang merupakan rekapitulasi data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan menurut Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, KKP telah mengatur status pemanfaatan empat jenis kerapu seperti *Epinephelus coioides* (Kerapu lumpur), *Epinephelus areolatus* (kerapu macan), *Variola albimarginata* (Kerapu ekor bulan), dan *Plectropomus leopardus* (Kerapu sunu/lodi). Status pemanfaatan berdasarkan penilaian status stok menggunakan metode penilaian *Spawning Potential Ratio* (SPR). Menurut Badruddin M (2015), dalam dokumen *Harvest Strategy*, (DJPT-KKP, 2022), SPR merupakan rasio dari *spawning stock biomass per recruits* (SSBR) di bawah berbagai tingkat laju kematian (mortalitas) penangkapan terhadap SSBR teoritis sebelum ada penangkapan.

Tabel 2. Nilai SPR jenis ikan kerapu prioritas di WPPNRI 713

No	Spesies	Nilai SPR (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Epinephelus coioides</i> (Kerapu lumpur)	NA	47 (32-61)	58 (51-65)	39 (34-44)	27 (25-29)
2	<i>Epinephelus areolatus</i> (kerapu macan)	19 (18-20)	18 (17-18)	11 (10-11)	12 (12-12)	17 (16-17)
3	<i>Variola albimarginata</i> (Kerapu ekor bulan)	20 (17-22)	35 (30-40)	29 (24-33)	30 (24-37)	44 (39-49)
4	<i>Plectropomus leopardus</i> (Kerapu sunu /lodi)	10 (8-11)	14 (12-16)	9 (8-10)	11 (10-11)	11 (8-13)

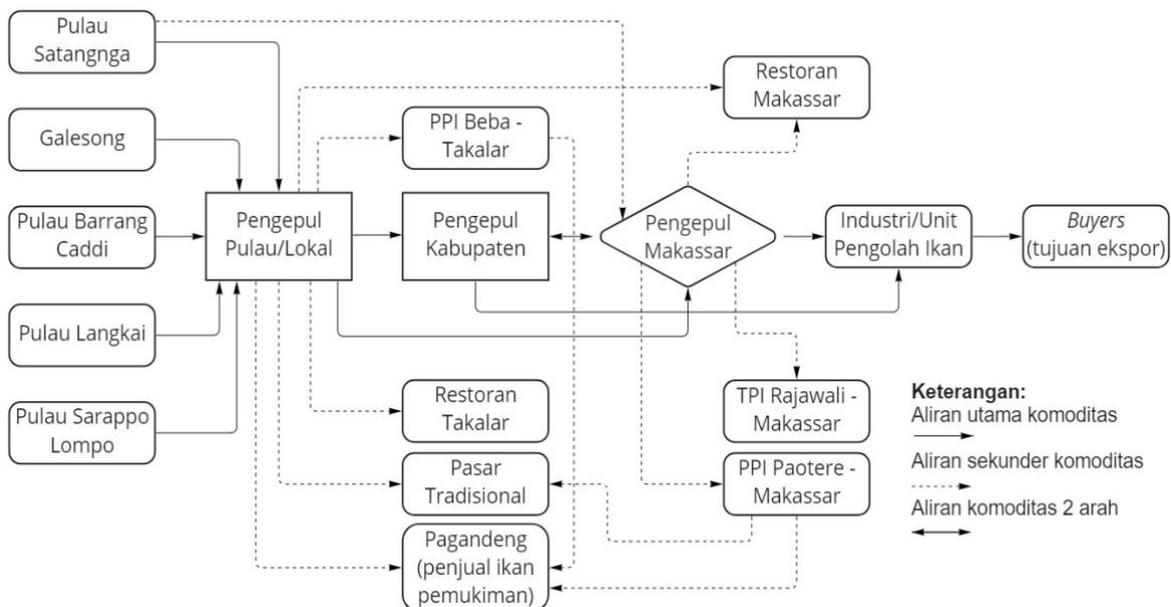
Sumber : Data diolah oleh BRPL (2021) dalam dokumen *Harvest Strategy*, (DJPT-KKP, 2022) dan update melalui Pembahasan Dokumen Strategi Pemanfaatan Kakap dan Kerapu di Kota Makassar (2022)

Keterangan:

- SPR < 20% : *Over-exploited*
- 20% ≤ SPR ≤ 30% : *Fully-Moderately exploited*
- SPR > 30% : *Under-exploited*
- NA : *Not Available* (data tidak tersedia)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, status stok ikan kerapu macan (*E. areolatus*) dan kerapu sunu (*P. leopardus*) memiliki nilai SPR di bawah titik acuan batas (SPR 20%), sementara ikan kerapu lumpur (*E. coioides*) dan kerapu ekor bulan (*V. albimarginata*) berada di atas titik acuan batas. Hal ini menjadi pertimbangan, terutama pada jenis kerapu sunu (*P. leopardus*) yang menjadi salah satu tangkapan utama nelayan dari lokasi penelitian dan merupakan jenis kerapu dengan permintaan ekspor dari UPI, serta menjadi salah satu hasil produksi kerapu berdasarkan data DKP Provinsi Sulsel.

Berikut gambaran rantai pasok ikan kerapu yang sangat kompleks dari nelayan di wilayah penelitian sampai ke industri maupun ekspor :



Gambar 1. Alur rantai pasok komoditas kerapu

Struktur pengelolaan perikanan kerapu di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda, ada yang menggunakan sistem punggawa-sawi dan ada juga yang tidak menggunakan sistem punggawa sawi. Punggawa-sawi merupakan komunitas dalam masyarakat maritim yang terbangun dalam sebuah kelompok sosial. Mereka memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan hasil-hasil usaha kepada anggota kelompoknya yang dikenal dengan sistem bagi hasil, yaitu sebuah cara yang diberlakukan pemilik modal atau punggawa terhadap sawi atau pekerjanya yang merupakan nelayan (Demmallino, Ali, Gassing, & Lampe, 2019). Secara umum, karakteristik nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mampu beradaptasi pada perubahan. Terutama perubahan pada aspek yang memengaruhi penghidupannya secara ekonomi dan sosial. Hal ini berpotensi menjadi pondasi untuk menyiapkan (*enabling condition*) keterlibatan nelayan dalam mendukung *co-management* perikanan kerapu skala kecil.

Stakeholder Kunci

Analisis hubungan antara pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), menghasilkan beberapa stakeholder kunci dalam *co-management* perikanan kerapu skala kecil di Sulawesi Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Pihak kunci untuk *co-management* kerapu di Sulawesi Selatan

Stakeholders	Interests	Potensial sinergi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten	Pencapaian Rencana Strategis, Kebijakan dan Program Dinas	Kolaborasi dalam mendorong kebijakan dan Program untuk pengelolaan perikanan kerapu skala kecil
Unit Pengolahan Ikan (UPI) FIP <i>member's</i>	Akses pasar ke luar negeri dan jaminan harga serta insentif dari pasar hijau	Produksi perikanan yang ramah lingkungan dan ketelusuran yang jelas
Kelompok Nelayan	Produksi perikanan yang ramah lingkungan dan ketelusuran yang jelas	Peningkatan kapasitas, akses bantuan peralatan tangkap dan administrasi perizinan kapal
Pengumpul Pulau/Lokal dan Darat	Permodalan usaha yang lebih besar; jaminan pasar yang lebih baik; motivasi karena terhubung dengan pasar utama mereka	Potensi kolaborasi memperkuat nelayan dan integrasi prinsip perikanan bertanggung jawab; resistensi karena menganggap akan mengganggu usahanya
<i>Champion</i> lokal	Ruang untuk terlibat	Menjadi tokoh kunci di tingkat tapak untuk mendorong penguatan perikanan kerapu
Bank dan BLU LPMUKP	Akses ke calon nasabah	Akses permodalan nelayan
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere dan Beba	Keterlacakan data perikanan kerapu	Kolaborasi terkait keterlacakan hasil perikanan kerapu dan pemasaran produksi perikanan kerapu
Akademisi/ Universitas	Riset, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan publikasi ilmiah	riset untuk pengembangan teknologi untuk mendukung perikanan kerapu skala kecil, Penelitian, pengabdian;

Analisis SWOT

Rumusan singkat dan kesimpulan analisis SWOT sederhana ini menghasilkan pendekatan utama di bawah ini:

Tabel 4. Hasil analisis SWOT

Internal (IFAS) Eksternal (EFAS)	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Optimalisasi peran pasar dan rantai pasok (strategi SO)	Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level (strategi WO)
Ancaman (<i>Threats</i>)	Penguatan nelayan dan kelembagaan lokal (strategi ST)	Mengumpulkan dukungan dan kolaborasi multipihak (Strategi WT)

Faktor Kunci Keberhasilan *Co-Management* Kerapu di Sulawesi Selatan

Aspek motivasi yang menjadi pertimbangan adalah para pihak lokal terutama nelayan skala kecil dan stakeholder lainnya dalam memperbaiki tata kelola perikanan kerapu skala kecil. Hal ini menjadi pondasi utama keberhasilan *co-management* bersama komunitas.

Tabel 5. Hasil analisis faktor kunci pada aspek motivasi

Kriteria pendukung	Faktor-faktor kunci	Status
Motivasi para pihak untuk mendapatkan <u>manfaat</u> dari <i>co-management</i>	Harapan nelayan agar perbaikan pengelolaan kerapu mendukung peningkatan penghidupan nelayan melalui <i>co-management</i>	Yellow
	Harapan industri untuk peningkatan keterlacakan dan pengakuan pasar global terhadap komoditas kerapu	Yellow
	Harapan pemerintah agar <i>co-management</i> dapat berkontribusi pada penguatan pendataan armada dan perizinan usaha di level tapak untuk peningkatan PAD dan penanganan <i>IUU Fishing</i>	Yellow
Komitmen stakeholders	Para pihak baik NGO, akademisi, pemerintah, swasta dan masyarakat berkomitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola perikanan kerapu	Green
	Komitmen para pihak untuk berkolaborasi	Yellow
Regulasi dan aturan main yang jelas	Adanya legalisasi, ruang dan akses bagi para pihak untuk mendorong pengelolaan perikanan kerapu skala kecil	Green
	Ada peraturan perundangan yang mewajibkan pengelolaan perikanan kerapu skala kecil (UU Perikanan, UU Perlindungan Nelayan, Perda Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Nelayan No. 1 tahun 2020, RPP Kakap-Kerapu, dan HS Kakap-Kerapu)	Green

Aspek kondisi yang mendukung merupakan aspek yang memungkinkan pengembangan *co-management* di tingkat tapak. Keberadaan faktor-faktor pendukung ini penting agar pengelolaan dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak.

Tabel 6. Hasil analisis faktor kunci pada aspek kondisi yang mendukung

Kriteria pendukung	Faktor-faktor kunci	Status
Kondisi Ekologis	Hasil tangkapan kerapu tersedia di lokasi penangkapan ikan nelayan	Yellow
	Tingkat ancaman terhadap ekosistem	Yellow
Kondisi Pasar	Permintaan pasar terhadap ikan kerapu yang ramah lingkungan dan sesuai dengan permintaan konsumen global	Yellow
	Pelaku pasar peduli dan mendorong ketelusuran (<i>traceability</i>) kerapu dari hasil-hasil penangkapan yang bijak	Yellow
	Jaminan harga dan insentif pelaku pasar terhadap hasil tangkapan kerapu dari pengelolaan yang baik	Red
Kondisi regulasi dan akses terhadap SDI	Status lokasi penangkapan jelas dan terjamin dalam kegiatan pengelolaan perikanan kerapu skala kecil berdasarkan RZWP3K	Green
	Terdapat larangan atau aturan yang jelas tentang penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	Green
Kondisi Sosial	Kesiapan nelayan untuk mengorganisir diri jika mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial	Yellow
	Institusi lokal dan keterikatan sosial (baca: <i>patron client</i>) di masyarakat terbuka untuk pendekatan baru melalui <i>co-management</i>	Yellow
Kondisi Instansi/kelembagaan	Adanya kelembagaan dan rencana <i>co-management</i> perikanan kerapu skala kecil	Red
	Mekanisme komunikasi dan koordinasi para pihak dan kelembagaan yang efektif	Red

Kriteria aspek pelaksanaan adalah aspek-aspek yang memudahkan jalannya *co-management* sehingga lebih *manageable*. Kriteria yang akan digunakan antara lain kepemimpinan, kewenangan lintas sektor, pengetahuan dan kapasitas para pihak, keuangan dan insentif dan umpan balik.

Tabel 7. Hasil analisis faktor kunci pada aspek pelaksanaan

Kriteria pendukung	Faktor-faktor kunci	Status
Kepemimpinan	Terdapat “ <i>champion</i> ” pendukung pengelolaan perikanan kerapu skala kecil di tingkat tapak baik di level nelayan, pengepul maupun pemimpin lokal	Yellow
	Ada komitmen politik lokal baik di level pemerintah provinsi maupun kabupaten yang mendukung pengelolaan perikanan kerapu skala kecil secara berkelanjutan	Green
Koordinasi lintas sektor	Koordinasi lintas sektor berjalan dan memudahkan para pihak menjalankan program dan kewenangannya	Yellow
Pengetahuan dan kapasitas para pihak	Kapasitas nelayan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi setara dalam <i>co-management</i>	Yellow
	Adanya organisasi nelayan yang mampu menjalankan <i>co-management</i> perikanan di tingkat tapak	Red
	Penyuluh dan pendamping nelayan menjalankan perannya dengan baik	Red
Keuangan dan insentif	Akses masyarakat dan organisasi nelayan terhadap pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan	Green
	Tersedianya dukungan pendanaan dari pihak luar untuk mendorong <i>co-management</i>	Green
Umpan balik	Mekanisme pengawasan kinerja, monitoring dan evaluasi yang efektif tersedia	Red

Model *Co-Management* Kerapu Skala Kecil

Pendekatan dan strategi intervensi *co-management* kerapu di Pesisir Barat Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yakni: (a) Telaah kondisi pengelolaan kerapu berdasarkan analisis SWOT yang melahirkan pendekatan utama intervensi *co-management*, dan (b) Status aspek motivasi, kondisi pendukung dan penunjang implementasi *co-management* berdasarkan analisis faktor kunci yang melahirkan strategi utama intervensi *co-management*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pendekatan utama dan strategi utama untuk intervensi *co-management* perikanan kerapu disusun dengan melihat hasil analisis SWOT dan melalui status diagnosa faktor kunci keberhasilan pengelolaan. Strategi yang disusun mengupayakan perubahan status merah dan kuning menuju hijau. Strategi utama diharapkan menjawab peningkatan status ini. Berikut pendekatan utama dan strategi utama yang menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.

Tabel 8. Pendekatan dan strategi utama untuk *co-management* kerapu skala kecil

Pendekatan Utama	Strategi Utama
Optimalisasi peran pasar dan rantai pasok melalui pendekatan rantai pasok	<p>Mendorong komitmen industri anggota FIP untuk optimalisasi keterlacakan, penerapan prinsip perikanan berkelanjutan dan pengakuan pasar global</p> <p>Pengembangan skema insentif dan/atau harga premium untuk produk perikanan ramah lingkungan</p> <p>Membuka peluang pasar premium produk perikanan berkelanjutan</p> <p>Pengumpulan data keterlacakan stok dan status perikanan kerapu</p> <p>Program nelayan binaan industri FIP member</p> <p>Mendorong peran industri dalam implementasi <i>harvest strategy</i> dan <i>harvest control rules</i></p> <p>Sertifikasi MSC (<i>Marine Stewardship Council</i>)</p>
Sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level melalui pendekatan teknokratik	<p>Sinergi untuk optimalisasi pendataan armada tangkap dan proses perizinan termasuk kartu nelayan/KUSUKA dan program database nelayan lainnya</p> <p>Penyusunan regulasi atau payung kebijakan yang sesuai untuk sinkronisasi peran pemerintah</p> <p>Mekanisme koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi program dan kebijakan pengelolaan kerapu</p> <p>Peningkatan kapasitas penyuluh dan pendamping masyarakat</p> <p>Penguatan <i>Monitoring Controlling</i> dan <i>Surveillance</i> (MCS) untuk penanganan IUU Fishing dan kontribusi sektor perikanan kerapu terhadap PAD.</p> <p><i>Scaling up</i> atau replikasi prototipe <i>co-management</i> ke lokasi lain</p>
Penguatan nelayan dan kelembagaan lokal melalui pendekatan partisipatif	<p>Riset aksi partisipatif nelayan terkait rantai pasok dan harga produk perikanan ramah lingkungan</p> <p>Pendataan dan monitoring perikanan menggunakan <i>log book</i> perikanan untuk memulai inisiatif keterlacakan tingkat lokal</p> <p>Mediasi diskusi komunitas reguler dan dialog terbatas dengan para pihak</p> <p>Pengorganisasi kelompok nelayan untuk <i>co-management</i></p> <p>Peningkatan peran “<i>champion</i>” pengelolaan perikanan kerapu skala kecil di level nelayan, pengepul maupun pemimpin lokal</p> <p>Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan</p> <p>Kunjungan belajar dan berbagi praktek cerdas perikanan berkelanjutan</p> <p>Fasilitasi pergantian alat tangkap ramah lingkungan</p> <p>Introduksi teknologi yang mendukung keterlacakan seperti VTS (<i>Vessel Tracking System</i>)</p> <p>Penguatan institusi dan kebijakan lokal (Peraturan Desa, dll)</p> <p>Pengorganisasian forum dan jejaring nelayan kerapu</p> <p>Fasilitasi berjalannya <i>Sustainable Small-Scale Fisheries</i> (SSSF) yang efektif di tingkat tapak</p>
Mengumpulkan dukungan dan kolaborasi multipihak melalui pendekatan kolaboratif	<p>Pembentukan komite bersama <i>co-management</i> kerapu Sulawesi Selatan</p> <p>Penyusunan Rencana Aksi <i>co-management</i> kerapu</p> <p>Penyusunan mekanisme refleksi, monitoring dan evaluasi program <i>co-management</i> yang mengakomodir peran multi pihak</p> <p>Implementasi prototipe atau pilot project <i>co-management</i> kerapu skala kecil</p> <p>Inisiasi kerjasama dengan lembaga pendanaan baik perbankan maupun permodalan lainnya</p> <p>Fasilitasi akses nelayan dan organisasi nelayan terhadap pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan (misalnya MoU dengan perbankan, dll)</p> <p>Mediasi dukungan pendanaan dari pihak luar untuk mendorong <i>co-management</i></p>

Rekomendasi peta jalan *co-management* kerapu skala kecil di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 3 tahapan pokok yaitu:

Tahap Inisiasi: Komitmen, Dukungan dan Pengorganisasian

Tahapan ini difokuskan pada upaya mempersiapkan pihak kunci untuk pengelolaan bersama. Pihak kunci utama adalah FIP *member* dalam hal ini UPI di Makassar; Nelayan dan kelompok nelayan skala kecil; serta pemerintah provinsi dan kabupaten. Tahap inisiasi awal didorong untuk pencapaian solusi simptomatik. Solusi ini bersifat merespon kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, memberi penyelesaian secara cepat, menarik dan mengumpulkan dukungan pihak kunci untuk ikut menggerakkan inisiatif *co-management*.

Selain solusi simptomatik, secara jangka panjang solusi fundamental *co-management* juga didorong kuat. Tentunya melalui sejumlah tahapan. Solusi fundamental juga dicirikan oleh visi jangka panjang masing-masing pihak kunci dalam perikanan kerapu skala kecil. Langkah-langkah pencapaian visi ini dijalankan sepanjang pentahapan inisiatif ini.

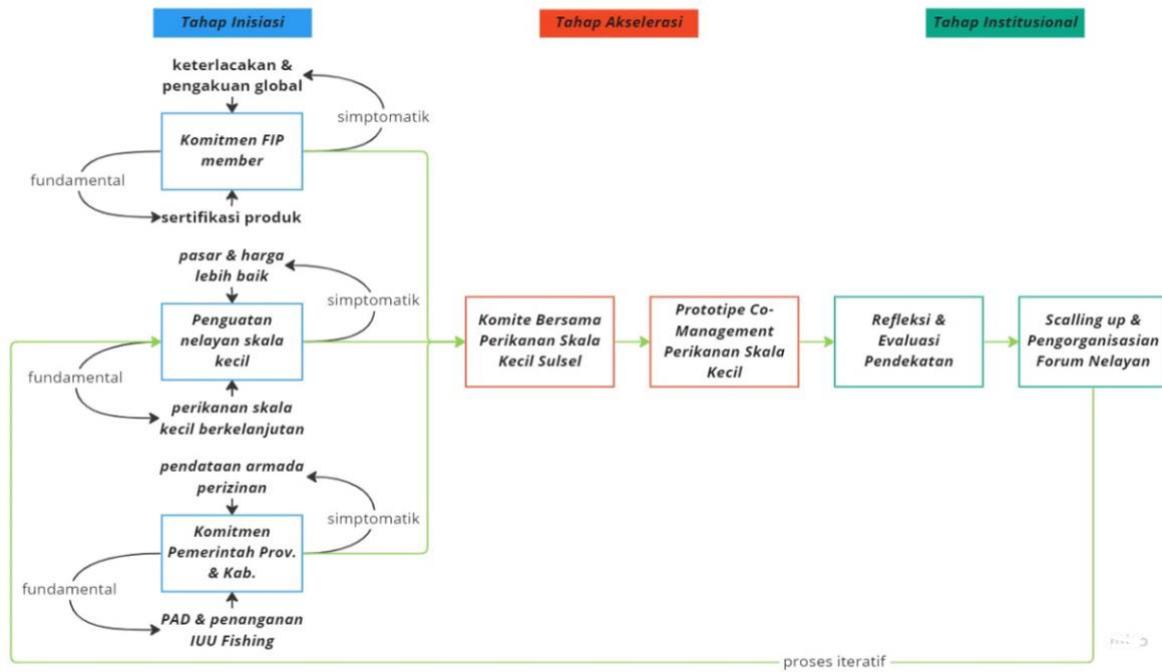
Tahap Akselerasi: Komite Bersama dan Prototipe co-management

Tahapan akselerasi difokuskan pada upaya membangun komitmen bersama pengelolaan kerapu berkelanjutan. Para pihak kunci yang diidentifikasi pada analisa stakeholder difasilitasi untuk bertemu dan membangun inisiatif bersama. Wadah koordinasi dan sinergi dibangun bersama para pihak untuk menggerakkan inisiatif bersama. Komite bersama menjadi wadah mendiskusikan pendekatan, strategi dan langkah-langkah operasional *co-management*. Anggota komite bersama menyusun rencana aksi pengelolaan yang tentunya mengedepankan kesetaraan peran dan partisipasi semua pihak.

Di sisi lain, penguatan nelayan didorong kuat. Setidaknya untuk memastikan kesenjangan kapasitas antara nelayan dan para pihak lainnya dipangkas. Tentunya agar nelayan dan organisasi nelayan bisa berperan setara dalam ruang kolaborasi. Praktek-praktek pengelolaan berkelanjutan di tingkat tapak mulai dijalankan. Tujuannya untuk penguatan kapasitas dan kepercayaan nelayan atas inisiatif lokalnya. Para pihak ikut berperan dan bekerja bersama dalam prototipe *co-management* tingkat tapak ini.

Tahap Institusionalisasi: Scaling up dan Pengorganisasian Forum Nelayan

Pembelajaran prototipe dianalisa dan dijadikan dasar utama *scaling up* pendekatan. Tahapan ini juga mulai membangun pelembagaan inisiatif di tingkat lokal. Baik itu penguatan di level pemerintah, organisasi nelayan maupun forum nelayan yang bisa menyebarkan inisiatif.



Gambar 2. Peta jalan model *co-management* perikanan kerapu skala kecil

Simpulan

Berdasarkan analisis SWOT dan diagnosa faktor kunci keberhasilan, pendekatan utama dan strategi utama model *co-management* perikanan kerapu skala kecil di antaranya adalah: (a) Pendekatan rantai pasok: optimalisasi peran pasar yang mengedepankan keterlacakan dan perbaikan tata kelola, (b) Pendekatan teknokratik: sinergitas dan sinkronisasi peran pemerintah di semua level, (c) Pendekatan partisipatif: penguatan nelayan dan kelembagaan lokal, (d) Pendekatan kolaboratif: mengumpulkan dukungan dan kolaborasi multipihak. Rekomendasi peta jalan *co-management* kerapu skala kecil di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 3 tahapan pokok yaitu: (a) Tahap Inisiasi: Komitmen, Dukungan dan Pengorganisasian, (b) Tahap Akselerasi: Komite Bersama dan Prototipe *co-management*, dan (c) Tahap Institusionalisasi: *Scaling up* dan Pengorganisasian Forum Nelayan.

Persantunan

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang berpartisipasi menjadi sumber informasi dan data terkait penelitian ini. Terutama kepada nelayan dari Galesong, Pulau Satangnga, Pulau Barrang Caddi, Pulau Langkai, dan Pulau Sarappo Lompo. Selanjutnya penulis juga memberikan apresiasi kepada para *reviewer* yang telah memberi masukan sebelum tulisan ini diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179-196.
- Bene, C., Christophe, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., . . . Williams, M. (2016). Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction Assessing the Current Evidence. *Elsevier*, 177–196.
- Conservation Alliance, T. C. (Revisi Januari 2021). *Pedoman untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan (Fisheries Improvement Project)*. San Francisco, CA, United States: The Conservation Alliance for Seafood Solutions.
- Demmallino, B. E., Ali, M. S., Gassing, A. Q., & Lampe, M. (2019). *Siratal Mustaqim (Kajian dan Gagasan Transformasi Peradaban Kemaritiman di Negeri Bugis - Makassar Sulawesi Selatan)*. Makassar: Penerbit Inzani.
- DJPT-KKP. (2022). *Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Kerapu (Grouper) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, XXV(3), 88-106.
- IUCN, & WRI. (2014). *Pedoman Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi* (Pedoman (Edisi Uji Coba) ed.). Gland, Swiss: IUCN.
- Jentoft, S. (1989). *Fisheries Co-management: Delegating Government Responsibility to Fishermen's Organizations*. Tromso, Norway: Butterworth & Co.
- Omar, S. B. (2016). *Dunia Ikan*. Bulaksumur, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Raazy, A. F., Moetasim, A. I., Dessibali, N., Zulkarnaen, A., & Rafiq, M. F. (2022). *Siasat dari Pulau: Konservasi melalui Tata Kelola Gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang*. Makassar: Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia.
- Rangkuti, F. (1997). *Teknik membedah kasus bisnis analisis SWOT*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- White, W. T., Last, P. R., Dharmadi, Faizah, R., Chodrijah, U., Prisantoso, B. I., . . . Blaber, S. J. (2013). *Jenis-Jenis Ikan di Indonesia*. Canberra, Australia: ACIAR Monograph No. 155. Australian Centre for International Agricultural Research.